

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pergeseran kebijakan luar negeri Filipina ke arah Tiongkok dalam sengketa Laut Cina Selatan selama era Ferdinand Marcos Jr. pada tahun 2023-2024 terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor domestik dan internasional, menciptakan peluang bagi pemerintah Filipina untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri Joakim Eidenfalk, pergeseran ini termasuk dalam kategori perubahan program, yaitu perubahan instrumen dan metode implementasi kebijakan tanpa secara fundamental mengubah tujuan utama kebijakan luar negeri Filipina.

Di dalam negeri, pergeseran kebijakan dipengaruhi oleh meningkatnya persepsi ancaman Tiongkok di dalam birokrasi keamanan Filipina, khususnya *Department of National Defense* (DND), *Armed Forces of the Philippines* (AFP), dan *Department of Foreign Affairs* (DFA), dan *Armed Forces of the Philippines* (PCG). Lebih lanjut, dukungan politik dari koalisi pemerintah Marcos Jr. sangat penting. Partai-partai seperti *Partido Federal ng Pilipinas* (PFP), *Lakas-CMD*, *Nationalist People's Coalition* (NPC), *Nacionalista Party*, *Hugpong ng Pagbabago* (HNP), dan *National Unity Party* (NUP) yang secara resmi bergabung dengan aliansi *UniTeam*, tekanan dari kelompok kepentingan seperti *PAMALAKAYA* dan *Koalisi Atin Ito*, liputan media nasional seperti *Philippine Daily Inquirer*, *Philippine Information Agency*, dan *The Philippine Star* tentang berbagai insiden maritim, dan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Tiongkok, semuanya telah berkontribusi dalam menciptakan legitimasi politik bagi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih tegas. Dengan demikian, faktor-faktor domestik

berperan dalam membentuk persepsi ancaman sekaligus memberikan dukungan politik yang diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan luar negeri.

Pada tingkat internasional, perubahan kebijakan dipengaruhi oleh meningkatnya tindakan koersif Tiongkok di Laut China Selatan yang memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Berbagai insiden yang terjadi di Second Thomas Shoal, Scarborough Shoal, dan wilayah sengketa lainnya mendorong Filipina untuk memperkuat langkah-langkah keamanan maritim. Selain itu, keterbatasan ASEAN dalam memberikan respons yang efektif terhadap sengketa Laut China Selatan membuat Filipina semakin mengandalkan kerja sama keamanan dengan mitra eksternal. Pada tingkat global, rivalitas antara AS-Tiongkok menciptakan lingkungan strategis yang memungkinkan Filipina memperoleh dukungan keamanan, diplomatik, dan pertahanan yang lebih besar dari AS dan negara-negara mitra lainnya.

Adanya interaksi terhadap serangan maritim tersebut kemudian membentuk *Windows of Opportunity* yang dimanfaatkan oleh Ferdinand Marcos Jr. untuk mengubah pendekatan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok. Perubahan tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama pertahanan dengan AS melalui *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA), peningkatan patroli bersama, penguatan transparansi terhadap insiden maritim, revitalisasi penggunaan putusan Arbitrase Laut China Selatan 2016, serta penerapan sikap diplomatik yang lebih tegas terhadap Tiongkok. Meskipun demikian, Filipina tidak sepenuhnya meninggalkan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Tiongkok sehingga

perubahan yang terjadi lebih menunjukkan penyesuaian strategi dibandingkan perubahan orientasi politik luar negeri secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok pada era Ferdinand Marcos Jr. merupakan hasil dari kombinasi tekanan eksternal dan dukungan domestik yang membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Oleh karena itu, teori Joakim Eidenfalk terbukti relevan dalam menjelaskan bagaimana faktor domestik dan internasional dapat berinteraksi dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil studi ini, direkomendasikan agar penelitian lebih lanjut tidak hanya berfokus pada faktor domestik dan internasional yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Filipina terhadap Tiongkok selama era Ferdinand Marcos Jr., tetapi juga meneliti lebih dalam efektivitas kebijakan ini dalam mencapai kepentingan nasional Filipina, khususnya dalam membela hak maritim di Laut Filipina Barat. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat memperluas cakupan analisis dengan meneliti peran negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dalam mendukung strategi Filipina di Laut Cina Selatan, serta meneliti dampak jangka panjang penguatan kerja sama keamanan melalui *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik.